

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprita, S. 2020. *Etika profesi hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Bachtiar, B. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpan Press.
- Dirjo Sisworo. 2003. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, Jakarta: Akademia Persindo.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Memahami Berbagai Profesi Dan Pekerjaan*, Media Pressindo.
- Mahmud Marzuki, P. 2005. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin, M. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram.
- Nuh, M. 2011. *Etika profesi hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahardi, P. 2014. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Soekanto, S. 2014. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Thalib. 2012. *Sanksi Pemidanaan dalam konflik pertanahan*. Jakarta: Kencana.
- Wignjosoebroto, S. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Prees.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indoneisa.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Prfesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022. Tentang Kode Etika Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Skripsi/Jurnal

Andi Christian, (2023) “Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Sebagai Lembaga Penegak Hukum di Indonesia”. *Skripsi*, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum.

Anwar Mayer Siregar, (2024) “Penegakan kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Repubblik Indonesia Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Prisma Hukum*, Vo. 8, No. 8.

Basyarudin, Budi Kurniawan, (2021) “Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Eko Gani, Shira Thani, et al, (2024) “Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed Di Kalangan Remaja Pada Siswa/I SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 5, No. 2.

Erwin Ubwarin, (2021) “Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)”. *Jurnal Belo*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

- Grendy John Tololiu, (2019), “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran kode Etik profesi”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 12.
- Golonggom, M. N. (2021). “Penegakan tindak pidana suap menurut ketentuan hukum pidana nasional”. *Lex Crimen*. Vol. X, April 2021.
- Hariyanti, D. (2023). Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *Melek Sintaks; Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 8.
- Kletus Dolu, (2017) “Penerapan Sanksi Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 32, No 3.
- Kintan Miftakhul Istiqomah, (2024), “Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3.
- Mujadi, M., & Borman, M. S. (2023). “Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12.
- Maulidin, et al, (2023), “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Misseris Cordiasi Simanjuntak, et al, (2024) “Implementasi Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Dihubungkan Dengan Kriminologi (Studi Putusan No: PUT KKEP /11/2018/KKEP)”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 7, No 1.
- Maria Margareth Manik, (2023) “Problematika Penegakan Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.
- Nurbaiti Syarif, Aos Kusni Palah, (2022) “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol 01, No. 01.
- Nurianto, A. D. D. (2017). “Penegakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dikaitkan dengan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polrestabes Surabaya”. *Novum: Jurnal Hukum*. Vol 01.

- Putri K, N. (2023). “Upaya Penegakan Dalam Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Kepolisian (Studi Kasus Polda Sulsel)”, *Skripsi*, Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Queena Sakti Citra Maharani, Aprillia Yovieta, (2023) “Penjatuhan Disiplin Etik Tindakan Menghapuskan Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4, No. 1.
- Rajalahu, Y. (2013). “Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia”. *Lex Crimen*, Vol II, No. 2.
- Saparingka, N. (2016). “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana”. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syahputra, F. (2024). “Penerapan Hukuman Sidang Kode Etik Profesi Polri Terkait Dengan Kewenangan Komisi Kode Etik Polri”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh.
- Sadidah, Q. (2024). “Analisis Proses Hukum Atas Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana”. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1.
- Sadewo, Da (2024). “Penerapan sanksi kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang melakukan pelanggaran etik kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, *Disertasi doctoral*, Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tololiu, G. J. (2019). “Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Dan Pelanggaran Kode Etik Profesi”. *Lex Crimen*, Vol. 8 No.12.
- Philicia Manuhutu, dkk, (2023) “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Yoslan K Koni, (2019) “Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Provinsi Gorontalo,” *Kertha Patrika*, Vol 41, No. 1.

D. Internet

- Kompas.com, “Profil Irjen Napoleon Bonaparte, Mantan Napi Kasus Suap yang hanya Disanksi Demosi” <https://www.kompas.com/tren/read/2023/>

08/30/103000065/profil-irjen-napoleon-bonaparte-mantan-napi-kasus-suap-yang-hanya-disanksi, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

Kompolnas, “Sidang KKEP Napoleon Bonaparte Putuskan 3 Tahun Demosi”, <https://kompolnas.go.id/2023/08/29/siding-kkep-napoleon-bonaparte-putuskan-3-tahun-demosi-kompolnas-win-win-solution/> Diakses pada tanggal 28 Agustus 2024.

Identitas.Com, <https://Identitas.Com/Penelitian-Hukum-Dikelompokkan-Berdasarkan-Sifat-Dan-Faktor-Kajian/>, Diakses Tanggal 04 September 2024.

Gramedia, Pengertian Deskriptif, Kreteria Dan Ciri-Cirinya, [http://www. Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/](http://www.Gramedia.com/Literasi/.Penelitian-Deskriptif/), Diakses Tanggal 04 September 2024.

Kompas.com, “*Polri Dinilai Sengaja Biarkan Irjen Napoleon Tidak Disidang Etik HinggaPensiun*”,<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/10/14083211/polri-dinilai-sengaja-biarkan-irjen-napoleon-tidak-disidang-etik-hingga>, Diakses 02 Januari 2025.

Kompas.com, “*Terbukti Aniaya M Kece, Irjen Napoleon Divonis 5 Bulan 15 Hari*”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/15/12551991/terbukti-aniaya-m-kece-irjen-napoleon-divonis-5-bulan-15-hari>, Diakses Pada 02 Januari 2025.